

AKSELERASI SEKTOR PENDIDIKAN DI KABUPATEN BIMA

Arsyad Abd. Gani¹,

¹Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Mataram, arsyad.gani@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 06-01-2021

Disetujui: 20-01-2021

Kata Kunci:

Akselerasi Pendidikan

ABSTRAK

Abstrak: Pendidikan di Kabupaten Bima hendaknya memiliki standar kualitas yang harus dicapai dalam lima tahun mendatang dengan meletakkan patokan-patokan terstandar pada setiap tahapnya. Penanganan pendidikan tidak boleh lengah dan berjalan secara linear (struktural) tanpa ada perubahan yang secara sadar ditetapkan dan yang paling penting adalah atas konvensi (kesepakatan) semua pihak. Kebutuhan akselerasi yang dimaksud adalah penyelenggaraan layanan prima di Kabupaten Bima mencakup marwah dan esensi pendidikan itu sendiri, bentuk dan isi, pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola yang selanjutnya akan dielaborasi dalam beberapa sub tema berikut: 1) Reformasi Birokrasi; 2) Penyegaran; 3) Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Pendidikan; 4) Pembiayaan Pendidikan; 5) Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri.

Abstract: Education in Kabupaten Bima should have quality standards that must be achieved in the next five years by putting standard benchmarks at each stage. Handling education must not be careless and run linear (structural) without any changes that are consciously determined and the most important thing is the convention (agreement) of all parties. The need for acceleration in question is the provision of excellent service in Bima Regency covering the spirit and essence of education itself, form and content, educators and education personnel, learning and assessment, facilities and infrastructure, funding, and governance which will then be elaborated in the following sub-themes: 1) Bureaucratic Reform; 2) Refreshment; 3) Improving the Quality of Educational Processes and Outcomes; 4) Education Financing; 5) Community Empowerment, Business World, Industrial World.



<https://doi.org/10.31764/elementary.v4i1.3975>

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Bima hendaknya mengacu kepada kerangka kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011. Hal ini menjadi keharusan, karena pada dasarnya setiap kebijakan tersebut merupakan implementasi amanat konstitusi dalam Amandemen UUD RI (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia) Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28 dan Pasal 31 sebagai wujud bahwa negara menjamin hak asasi setiap warga atas pendidikan.

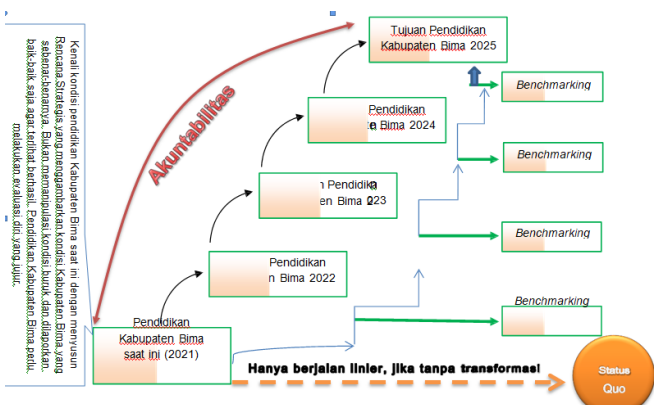
Implementasi Amandemen UUD RI Tahun 1945 tersebut diantaranya telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UU Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya, amanat UU Nomor 20/2003 dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; dan PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan serta berbagai regulasi lainnya yang sesungguhnya menjadi kompas bagi setiap jenjang pemerintahan untuk konsen terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bima selain dihatatkan guna memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi

Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada poin 4 yaitu *Quality Education*, dan *World Summit on Sustainable Development*, juga diarahkan sebagai arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Bima terkait dengan cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran strategis, mengindikasikan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan di Kabupaten Bima.

Pendidikan di Kabupaten Bima hendaknya memiliki standar kualitas yang harus dicapai dalam lima tahun mendatang dengan meletakkan patokan-patokan terstandar pada setiap tahapnya. Penanganan pendidikan tidak boleh lengah dan berjalan secara linear (struktural) tanpa ada perubahan yang secara sadar ditetapkan dan yang paling penting adalah atas konvensi (kesepakatan) semua pihak. Perubahan itu hanya dapat dicapai dengan menetapkan tujuan-tujuan yang berbeda namun terintegrasi pada setiap tahapnya. Tahapan tersebut dapat ditetapkan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian ada lima patokan duga (*benchmarking*) yang menjadi target capaian pembangunan pendidikan sebagaimana diilustrasikan dalam bagan berikut:



B. METODE

Tulisan ini merupakan kajian pustaka. Dalam tulisan ini, penulis mengungkapkan beberapa konsep akselerasi pendidikan yang diperkuat dengan beberapa konsep pendidikan menurut pendapat para ahli. Konsep akselerasi tersebut disesuaikan dengan realita pendidikan di Kabupaten Bima dalam mengelola pendidikan. Berdasarkan realita tersebut penulis merumuskan beberapa arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bima sebagai komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan kajian-kajian intens selama beberapa tahun terakhir ini, sebagai akademisi saya berkewajiban untuk turut menyumbangkan beberapa

pokok pikiran yang diharapkan dapat turut membantu kebutuhan akselerasi pendidikan di Kabupaten Bima. Kebutuhan akselerasi yang dimaksud adalah penyelenggaraan layanan prima di Kabupaten Bima mencakup marwah dan esensi pendidikan itu sendiri, bentuk dan isi, pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola yang selanjutnya akan dielaborasi dalam beberapa sub tema berikut:

1. Reformasi Birokrasi

Pada prinsipnya, pendidikan diharapkan dikelola oleh figur-figur terbaik Kabupaten Bima yang memiliki kompetensi memadai dalam bidang pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bima hendaknya mempertimbangkan Reformasi Birokrasi Dikpora secara Total terhadap Pejabat Eselon yang harus sesuai dengan Analisis Kompetensi Aparatur. Dibutuhkan pejabat yang memiliki kompetensi Akademik (75%) dan kompetensi manajerial (25%). Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan lima poin berikut:

- a. Restrukturisasi organisasi yang mendukung visi dan misi pendidikan Kabupaten Bima;
- b. Penyempurnaan tata laksana;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. Pengembangan sistem pengukuran dan remunerasi berbasis kinerja;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan demikian dalam rangka profesionalisme pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bima, maka pejabat di lingkungan Dinas Dikpora harus berlatar belakang Sarjana Pendidikan dan pernah bekerja sebagai pendidik atau tenaga kependidikan yang berkepribadian terpuji dan akuntabel.

2. Penyegaran

Transformasi kualitas pendidikan Kabupaten Bima dapat berhasil bila dilakukan penyegaran-penyegaran berkelanjutan. Hal ini dirasakan penting mengingat terjadi disparitas kualitas antara sekolah-sekolah di pusat pemerintahan dengan sekolah-sekolah pinggiran di desa-desa. Ironis memang, karena jumlah sekolah yang berlokasi di desa lebih banyak secara kuantitas tetapi termarginalkan secara kualitas. Hal ini terjadi salah satunya turut disebabkan oleh menumpuknya guru-guru berkualitas baik di sekolah-sekolah yang dianggap favorit (maju) yang tentu saja selalu menjadi sorotan pembinaan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bima hendaknya mempertimbangkan dua hal berikut:

- a. Penyegaran terhadap kepala sekolah yang berpengalaman untuk dimutasi secara merata yang utamanya di daerah pinggiran. Kebijakan memberikan promosi bagi kepala sekolah pinggiran untuk menjabat sekolah-sekolah favorit

(sekolah maju), barangkali perlu diseimbangkan dengan menempatkan kepala-kepala sekolah maju tersebut di sekolah-sekolah pinggiran agar mereka dapat mengimbaskan pengalamannya demi kemajuan sekolah pinggiran.

- b. Masa tugas guru senior di sekolah maju maksimal 8 tahun selanjutnya disebarkan ke semua sekolah yang tingkat kelulusan dan daya serapnya rendah.
3. Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Pendidikan

Beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bima sepertinya selalu tertinggal peringkat perolehan rerata nilai UN dari Kabupaten/Kota lainnya di NTB. Tahun 2018 dan 2019 berada pada peringkat keenam. Hal ini menjadi sangat ironis karena Kabupaten Bima selama beberapa dekade merupakan barometer bagi kualitas pendidikan di NTB. Guru-guru terbaik Kabupaten Bima menjadi fasilitator dalam berbagai kegiatan diklat peningkatan kualitas dan kapasitas guru baik tingkat kabupaten, Provinsi bahkan Nasional.

Menurut hemat saya, bila penyegaran tersebut dilakukan, maka akan menghasilkan pemerataan dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Namun demikian, terdapat beberapa konsep aplikatif yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengefektifkan wadah guru-guru melalui MGMP bagi guru SMP/MTs, gugus melalui PKG bagi guru-guru SD/MI dan PAUD.
 - b. Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa dengan mengedepankan kearifan lokal Mbojo.
 - c. Peningkatan Mutu melalui pembinaan terhadap siswa yang berprestasi secara berjenjang.
 - d. Pembinaan terhadap pengawas, kepala sekolah dan guru yang berprestasi secara berjenjang.
 - e. Pembinaan sanggar sekolah yang menjadi ciri khas Kabupaten Bima.
 - f. Pembinaan O2SN untuk semua jenjang.
 - g. Pembinaan kreatifitas siswa untuk semua jenjang.
4. Pembiayaan Pendidikan

Tujuan mulia Kabupaten Bima yang "*Maja Labo Dahu*" diharapkan dapat membias pada pola pembiayaan pendidikan yang merata berkeadilan. Betapa tidak anggaran pendidikan yang sudah disepakati sebesar 20% diharapkan dapat memberikan jaminan bagi terselenggaranya pendidikan yang mudah diakses, berkualitas dan relevan dengan sasaran pembangunan. Untuk itu, hal pertama yang diusulkan yaitu anggaran pendidikan Kabupaten Bima hendaknya minimal 20% di luar gaji guru.

Terakhir, bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu disinyalir banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu dibutuhkan data base yang akurat sehingga

pemerintah benar-benar dapat melakukan pemetaan masyarakat miskin kota yang memang perlu dibantu pendidikan, kesehatan dan aksesnya dalam berbagai bidang.

5. Perluasan Akses Informasi, Teknologi dan Komunikasi Sistem Informasi Pendidikan Kabupaten Bima sudah menunjukkan geliat ke arah pertumbuhan yang baik. Namun sayangnya akses pada kemudahan informasi, teknologi dan komunikasi tidak merata dinikmati oleh sekolah-sekolah pinggiran. Ketika sekolah-sekolah favorit menikmati hotspot dengan kecepatan tinggi, sekolah-sekolah pinggiran hanya bisa mendengar tanpa mampu berbuat apa-apa (atau hanya dengan upaya yang tidak maksimal). Ketidakberdayaan sekolah untuk membangun dan mengembangkan perangkat lunak yang menunjang perolehan informasi, teknologi dan komunikasi diharapkan dapat diakses secara merata dan berkeadilan oleh seluruh jenjang dan tingkatan pendidikan di Kabupaten Bima.

Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa terobosan berikut:

- a. Pemerataan akses jaringan internet.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.
 - c. Pengembangan e-manajemen, e-laporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan public.
 - d. Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di berbagai satuan pendidikan.
6. Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri

Keberhasilan pendidikan sangat besar dipengaruhi oleh peran sentral dan tanggung jawab tiga pilar utama yaitu pemerintah, sekolah dan masyarakat. Untuk itu masyarakat hendaknya diberdayakan baik melalui Dewan Pendidikan Kabupaten Bima maupun melalui jalinan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang peduli pendidikan. Singkatnya pemberdayaan tersebut dapat berwujud.

- a. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industry.
- b. Optimisasi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk bidang pendidikan.
- c. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan seperti penyelenggaraan satuan pendidikan dan dengan organisasi profesi seperti penyusunan program sertifikasi profesi.

- Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan
- d. dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.
 - e. Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM.
 - f. Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kontribusi pendidikan yang berhasil merupakan salah satu indikator kesuksesan dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2021 s.d 2025. Beberapa pokok pikiran yang kami sumbangkan di atas memang belum semuanya. Kami hanya melihat beberapa aspek strategis yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Kabupaten Bima saat ini. Untuk dapat melaksanakan dengan sukses proses transformasi kualitas pendidikan Kabupaten Bima, maka diperlukan asupan dana memadai yang tersedia melalui APBD.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan tersebut maka kami sarankan agar pokok-pokok pikiran tersebut kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bima semoga dapat dijadikan salah satu acuan dalam akselerasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Bima.

DAFTAR RUJUKAN

Arcaro, Jerome S., 2007. *Pendidikan Berbasis Mutu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Caiden, G.E.1969. *Administrative Reform*, Aldine, Chicago, Illinois

Heckman, J. 2000, *Policies to Foster Human Capital*, Irving B. Harris Graduate School of Public Policy Studies, University of Chicago, Ill.

Levacic, R. 1995. *Local Management of School: Analysis and Practice*. Hongkong: Open University Press.

Owen, G Robert, 1991. *Organizational behavior in Education*, Boston, Mas: Allyn and Bacon, Inc.,

Stinger, Robert, 2002. *Leadership and Organizational Climate: The Cloud Chamber Effect*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall,

Wirawan, 2008. *Budaya dan Iklim Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat